BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pemungutan dan perhitungan suara Pemiluada Tana Toraja Tahun 2010 di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan 401 (empat ratus satu) TPS sesungguhnya telah berlangsung tertib, aman dan lancar tanpa gangguan. Namun beberapa jam pasca perhitungan suara di TPS-TPS, pendukung pasangan calon yang kalah melakukan aksi dengan mengobrak-abrik dan membakar fasilitas beberapa kantor. Aksi tersebut, menyebabkan 286 kotak suara beserta kertas suara dari 12 kecamatan hangus terbakar. Aksi massa dari pasangan calon kalah yang berlangsung dua hari menyebabkan suasana Tana Toraja pada saat itu, cukup mencekam. Aksi tersebut, telah meninggalkan duka yang mendalam bagi proses demokrasi di Tana Toraja dengan jatuhnya satu korban jiwa tak bersalah dari masyarakat.

Peristiwa kerusuhan beberapa jam pasca perhitungan suara di TPS pada Pemiluada Tana Toraja dapat dikatakan sebagai konflik politik. Sebab konflik tersebut terkait dengan upaya perebutan kekuasaan yaitu jabatan sebagai Bupati dan wakil Bupati. Dikatakan sebagai konflik karena berawal dari peristiwa kerusuhan tersebut, maka terjadilah sengketa hasil Pemiluada oleh pasangan calon kalah dengan pasangan calon menang yang penyelesaiannya sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Konflik disebabkan oleh lemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai luhur demokrasi, yakni yang terkait dengan hasil Pemiluada. Pasangan yang

belum berhasil dan aktor-aktor politiknya maupun pendukung pasangan yang kalah kurang mampu menerima kekalahan. Faktor utama yang menyebabkan aksi pengrusakan dan pembakaran oleh pendukung pasangan yang kalah adalah hasil sementara perolehan suara melalui *quick count* (metode hitung cepat) yang dilansir oleh beberapa lembaga survey dan Tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Pembakaran kotak suara dan kertas suara di 12 (dua belas) kecamatan merupakan cerminan sikap keengganan menerima kekalahan.

B. Rekomendasi

1. Undang-Undang Pemilukada sebaiknya disempurnakan dengan mengatur bentuk-bentuk kegiatan yang tergolong *money politics* beserta sanksinya yang tegas. Sebab salah satu faktor penyebab utama terjadinya konflik pemilukada di Indonesia adalah praktek *money politics* yang agak sulit dibedakan dari *costpolitics*.
2. Sebaiknya ada juga Undang-undang yang mengatur tentang Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai implikasi hukum yang tegas dan jelas. Sebab salah satu unsur penggerak terjadinya kerusuhan/konflik Pemilukada yaitu ketidakpuasan Tim sukses pasangan yang kalah.